PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN DALAM PENCATATAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Abdi Maulana
NPP. 33.0810
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: muhabdi54@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Anya Risnawati, S.P., M.Si
Email: anyarisnawati@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study focuses on the gap between the increasing number of migrants entering Balikpapan City as a supporting city of the new national capital and the number of non-permanent residents recorded in the population database. Although the local government has established regulations and implemented the Wacat application for electronic reporting, many non-permanent residents remain unregistered, creating potential inaccuracies in development planning, public service allocation, and population administration management.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the utilization of the population database in recording non-permanent residents in Balikpapan City.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews with key stakeholders, observations of service and data management processes, and documentation studies. Data analysis was conducted thematically using Napitupulu's Utilization Theory consisting of functional, managerial, and technical dimensions, supported by NVivo 15 software.* ***Result:*** *The findings indicate that the utilization of the population database in recording non-permanent residents has been implemented across functional, managerial, and technical dimensions. In the functional dimension, the database has become the primary instrument for recording and providing services to non-permanent residents, although its utilization is constrained by limited digital literacy, low public participation in reporting, and dependence on manual recording systems. In the managerial dimension, the utilization is supported by a clear regulatory framework, organizational structure, and coordination mechanisms; however, the implementation of standard operating procedures, training coverage, data quality supervision, and stakeholder collaboration have not fully adapted to the dynamics of population mobility. In the technical dimension, the existing hardware, software, and data security systems are generally adequate, but network stability, server capacity, and the distribution of supporting devices remain insufficient to accommodate increasing service demands and real-time data updating.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the utilization of the population database in recording non-permanent residents in Balikpapan City has generally functioned well but still requires improvements in community participation, institutional management, and technological infrastructure to optimize population administration services.*

Keywords: *database utilization; non-permanent residents; population administration; Wacat application.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara tingginya arus mobilitas penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara dengan jumlah penduduk non permanen yang tercatat dalam database kependudukan. Meskipun Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki regulasi dan aplikasi Wacat sebagai sarana pelaporan elektronik, masih terdapat banyak penduduk non permanen yang belum terdata sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perencanaan pembangunan, alokasi pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi kependudukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan, observasi terhadap proses pelayanan dan pengelolaan data, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan Teori Pemanfaatan Napitupulu yang terdiri atas dimensi fungsional, manajemen, dan teknis serta didukung dengan penggunaan perangkat lunak NVivo 15. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen telah dilaksanakan melalui dimensi fungsional, manajemen, dan teknis. Pada dimensi fungsional, database kependudukan telah menjadi instrumen utama dalam pencatatan dan pelayanan penduduk non permanen, namun masih terkendala rendahnya literasi digital masyarakat, rendahnya partisipasi pelaporan, dan ketergantungan pada pencatatan manual. Pada dimensi manajemen, pemanfaatan database didukung oleh kerangka regulasi, struktur organisasi, dan koordinasi yang cukup jelas, tetapi implementasi standar operasional prosedur, pelatihan, pengawasan kualitas data, dan sinergi antar pemangku kepentingan belum sepenuhnya mengikuti dinamika mobilitas penduduk. Pada dimensi teknis, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem keamanan data pada dasarnya telah memadai, namun stabilitas jaringan, kapasitas server, dan distribusi perangkat pendukung masih perlu ditingkatkan guna menunjang pelayanan dan pembaruan data secara real time. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan manajemen kelembagaan, dan optimalisasi infrastruktur teknologi informasi agar pencatatan penduduk non permanen dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan akurat.
Kata kunci: Administrasi kependudukan; aplikasi Wacat; pemanfaatan database; penduduk non permanen.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mobilitas penduduk merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan pembangunan wilayah. Pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain tidak hanya menghasilkan migrasi permanen, tetapi juga memunculkan kelompok penduduk non permanen yang tinggal sementara untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Menurut (Mphahlele et al., 2025), mobilitas penduduk merupakan perpindahan

penduduk yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Dalam konteks pembangunan daerah, mobilitas yang tinggi menuntut tersedianya sistem administrasi kependudukan yang mampu mencatat keberadaan penduduk secara akurat dan mutakhir (Khoong et al., 2021).

Administrasi kependudukan memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Data kependudukan yang akurat diperlukan untuk menentukan kebutuhan layanan dasar, alokasi anggaran, serta penyediaan infrastruktur publik. Sebaliknya, ketidakakuratan data dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan pelayanan masyarakat . Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen (Surya et al., 2022).

Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk secara signifikan. Posisinya sebagai kota penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Balikpapan sebagai pusat aktivitas ekonomi, industri, dan jasa (Sri Hartati, 2019). Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menunjukkan bahwa jumlah penduduk non permanen meningkat dari 5.112 orang pada tahun 2022 menjadi 6.620 orang pada tahun 2024. Pada periode yang sama, jumlah penduduk datang meningkat dari 24.350 orang menjadi 30.125 orang. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Balikpapan semakin menjadi tujuan utama mobilitas penduduk dari berbagai daerah (Inibalikpapan, 2025).

Untuk mendukung pencatatan penduduk non permanen, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan sistem database kependudukan yang didukung oleh aplikasi Wacat sebagai media pelaporan elektronik (Chai & Mao, 2022). Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pendataan, meningkatkan akurasi informasi, dan mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif. Namun demikian, pelaksanaan sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan masyarakat, keterbatasan literasi digital, ketergantungan pada pencatatan manual di tingkat RT/RW, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi (Soerya Putri, 2016).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen masih memerlukan evaluasi yang komprehensif. Mengingat pentingnya data kependudukan bagi perencanaan pembangunan dan kesiapan (Escobar-González et al., 2024) Balikpapan sebagai kota penyangga IKN, penelitian mengenai pemanfaatan database kependudukan menjadi relevan untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pemanfaatan Database Kependudukan dalam Pencatatan Penduduk Non Permanen di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi yang jelas dan didukung oleh aplikasi Wacat sebagai sarana pelaporan elektronik, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah penduduk datang dengan jumlah penduduk non permanen yang tercatat dalam database kependudukan (Yuniasari et al., 2021).

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk datang mencapai 30.125 orang, sedangkan penduduk non permanen yang tercatat hanya 6.620 orang. Dengan demikian, terdapat sekitar 23.505 orang atau sekitar 78 persen pendatang yang belum terlaporkan dalam sistem administrasi kependudukan. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap administratif yang berpotensi memengaruhi kualitas data kependudukan serta efektivitas perencanaan pembangunan daerah (Marthalina, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas digitalisasi administrasi kependudukan, penerapan sistem informasi pemerintahan, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen pada daerah penyangga IKN, khususnya dengan menganalisis aspek fungsional, manajemen, dan teknis dalam pengelolaan data kependudukan (Marthalina, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pemanfaatan database kependudukan di Kota Balikpapan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Kota Balikpapan sedang menghadapi peningkatan mobilitas penduduk yang sangat tinggi sebagai dampak pembangunan IKN dan pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan data penduduk non permanen yang akurat menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pengendalian dampak urbanisasi secara efektif (Syaefullah et al., 2022).

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai tingkat efektivitas pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen. Akibatnya, kebijakan yang disusun berisiko tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, maupun infrastruktur lainnya (Andreassen et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas database kependudukan, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Wacat, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih akurat, efektif, dan responsif terhadap dinamika mobilitas penduduk (Simangunsong, 2017).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas administrasi kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta pendataan penduduk non permanen. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian administrasi kependudukan memiliki variasi fokus, teori, metode, dan objek penelitian yang berbeda-beda. Putri dan Gusty mengkaji implementasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada warga non permanen dalam memitigasi urbanisasi di Kota Surabaya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa pencatatan penduduk non permanen belum optimal karena rendahnya kepatuhan masyarakat, kurangnya pemahaman hukum, dan terbatasnya akses layanan administrasi kependudukan (Putri & Gusty, 2025).

Aini dan Firmansyah meneliti efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan efektivitas sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAK telah berjalan namun masih menghadapi kendala jaringan, keterbatasan perangkat, dan kurangnya operator yang kompeten (Aini & Firmansyah, 2022).

Penelitian Ni Luh Putu Sri Utami dan Nyoman Diah Utari Dewi membahas efektivitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen di Kelurahan Tonja, Denpasar. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan efektivitas organisasi, penelitian tersebut menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, fragmentasi data antara pusat

dan daerah, serta keterbatasan sosialisasi menjadi faktor utama belum optimalnya pencatatan penduduk non permanen (Utami & Dewi, 2019).

Selanjutnya, Anggraini dan Manar meneliti implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK menggunakan perspektif Good Governance. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIAK mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Anggraini & Manar, 2025).

Penelitian oleh Alam mengkaji efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan penerbitan KTP elektronik di Kabupaten Halmahera Barat menggunakan sebelas indikator efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAK telah berfungsi cukup efektif dalam mendukung pelayanan kependudukan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi (Alam, 2024).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis, mulai dari implementasi kebijakan publik, efektivitas sistem informasi, efektivitas organisasi, hingga Good Governance. Selain itu, objek penelitian yang digunakan juga bervariasi, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan secara umum hingga penduduk non permanen di berbagai daerah. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen pada daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya Kota Balikpapan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan secara spesifik oleh penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) (Suwanda, 2015). Berbeda dengan penelitian Putri dan Gusty yang menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik, penelitian Aini dan Firmansyah yang berfokus pada efektivitas SIAK, maupun penelitian Anggraini dan Manar yang menggunakan perspektif Good Governance, penelitian ini menggunakan Teori Pemanfaatan dari Napitupulu yang terdiri atas dimensi fungsional, manajemen, dan teknis (Prabowo, 2019).

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi objek penelitian karena secara khusus mengkaji pencatatan penduduk non permanen yang memiliki tingkat mobilitas tinggi di Kota Balikpapan. Karakteristik wilayah penelitian yang merupakan kota penyangga IKN memberikan dinamika kependudukan yang berbeda dibandingkan daerah lain yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian ini juga tidak hanya menganalisis pemanfaatan database kependudukan, tetapi sekaligus mengidentifikasi kendala serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pendataan penduduk non permanen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam pengembangan kajian administrasi kependudukan berbasis digital pada wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen berdasarkan dimensi fungsional, manajemen, dan teknis.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pemanfaatan database kependudukan

dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan proses pendataan. Metode kualitatif deskriptif dinilai tepat karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik, kontekstual, dan mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis maupun generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman makna, proses, dan dinamika yang terjadi dalam pemanfaatan database kependudukan sebagai instrumen pelayanan administrasi kependudukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan database kependudukan. Informan yang terlibat terdiri atas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian juga melibatkan Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Operator SIAK, Lurah, Ketua RT/RW, Pengelola Hunian Sementara (hotel, apartemen, dan kontrakan), serta empat orang masyarakat yang pernah melakukan pencatatan penduduk non permanen. Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi regulator, pelaksana, mitra pelaksana, hingga penerima layanan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan sistematika analisis, penelitian ini juga memanfaatkan aplikasi NVivo dalam proses pengkodean data, pengelompokan tema, identifikasi pola, dan visualisasi hubungan antar kategori. Penggunaan NVivo membantu peneliti dalam mengelola data yang kompleks sehingga hasil analisis menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, serta beberapa wilayah administrasi yang menjadi lokasi pencatatan penduduk non permanen. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Maret sampai April 2026, yang meliputi tahap observasi lapangan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumentasi, pengolahan data, hingga analisis hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemanfaatan Database Kependudukan dalam Pencatatan Penduduk Non Permanen di Kota Balikpapan

1. Dimensi Fungsional

Peneliti melakukan analisis terhadap pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan melalui dimensi fungsional yang meliputi indikator pengetahuan dan keterampilan, motivasi dan sikap, akses dan partisipasi, serta kepuasan pengguna. Dimensi ini digunakan untuk melihat sejauh mana para pemangku kepentingan memahami,

memanfaatkan, dan merasakan manfaat database kependudukan dalam proses pencatatan penduduk non permanen.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hasil Observasi Kesiapan Aparatur dan Infrastruktur Layanan Berdasarkan Tinjauan Regulator

No	Indikator Penilaian Kesiapan Sistem Birokrasi dan SDM Aparatur	Status Observasi Empiris	Deskripsi dan Bukti Temuan Analitis di Lapangan
1	Pemahaman aparatur terhadap prosedur yurisdiksi dan tata cara komputasi SIAK untuk modul pendaftaran penduduk non-permanen.	Memenuhi Standar Prima	Para aparatur secara konsisten menunjukkan tingkat literasi birokrasi dan literasi digital yang sangat mumpuni. Mereka memahami sepenuhnya landasan filosofis dan operasional hukum serta mampu membedakan alur eksekusi aplikasi untuk pendatang sementara tanpa menghapus status domisili asal warga bersangkutan.
2	Ketersediaan infrastruktur pendukung manajemen keamanan fisik dan perangkat pengolah data mutakhir di ruang kerja pegawai.	Memenuhi Standar Prima	Ruang kerja pegawai didukung mutlak oleh infrastruktur pemantauan terpusat (CCTV) dan ketersediaan perangkat *Personal Computer* (PC) yang senantiasa terkoneksi ke jaringan intranet nasional, yang menjamin keberlangsungan roda elektronifikasi pemerintahan (*e-government*) secara stabil tanpa jeda operasional.
3	Optimalisasi upaya pengawasan teritorial dan koordinasi lintas wilayah terkait manajemen lonjakan pendatang massal.	Memenuhi Standar Prima	Aparatur tingkat wilayah secara periodik dan terencana senantiasa melaksanakan fungsi koordinasi vertikal maupun horizontal untuk menertibkan tata laksana administrasi kependudukan bagi seluruh pekerja pendatang di wilayah administratif kerjanya.

Sumber : diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa aparatur Disdukcapil Kota Balikpapan telah memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai basis database kependudukan. Operator pelayanan mampu melakukan verifikasi data, entri data, koreksi data, hingga menghasilkan laporan kependudukan yang dibutuhkan dalam pencatatan penduduk non permanen. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa aspek pengetahuan dan keterampilan aparatur telah mendukung implementasi database kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menunjukkan bahwa database kependudukan dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan data penduduk non permanen yang akurat memungkinkan pemerintah daerah memperoleh gambaran riil mengenai jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas publik sehingga kebijakan dan alokasi anggaran dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

Selain aparatur Disdukcapil, pemahaman mengenai pencatatan penduduk non permanen juga telah dimiliki oleh aparat kelurahan dan RT. Namun demikian, tingkat pemahaman tersebut masih bervariasi. Pada beberapa wilayah ditemukan bahwa pergantian personel menyebabkan perlunya pelatihan ulang agar petugas memahami prosedur pencatatan yang berlaku. Pengelola hunian seperti rumah kos, kontrakan, hotel, dan apartemen umumnya mengetahui kewajiban pelaporan penghuni non permanen, meskipun belum seluruhnya memahami proses pemanfaatan data yang mereka laporkan ke dalam sistem database kependudukan.

Dari aspek motivasi dan sikap, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam mendukung pencatatan penduduk non permanen. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan petugas untuk tetap melaksanakan pelayanan meskipun menghadapi berbagai kendala teknis seperti gangguan jaringan dan tingginya volume pekerjaan. Para operator

menyadari bahwa database kependudukan berperan penting dalam mencegah terjadinya data ganda serta meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan.

Di sisi lain, motivasi masyarakat non permanen masih menunjukkan variasi. Sebagian masyarakat menganggap pencatatan penduduk non permanen penting karena dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan publik dan meningkatkan kepastian administrasi kependudukan. Akan tetapi, masih terdapat kelompok masyarakat yang memandang proses pelaporan sebagai beban administratif tambahan, terutama bagi mereka yang hanya tinggal dalam jangka waktu relatif singkat.

Pada indikator akses dan partisipasi, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan berbagai saluran pelayanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Layanan pencatatan penduduk non permanen dapat dilakukan melalui kantor Disdukcapil, kantor kelurahan, RT, pelayanan jemput bola, hingga melalui aplikasi digital Wacat (Wargaku Ke Capil Aku Tau).

Gambar 4.3

Tampilan Aplikasi Wacat sebagai Sarana Pelaporan Penduduk Non Permanen



Sumber : Disdukcapil Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil observasi, aplikasi Wacat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengisi formulir elektronik, mengunggah dokumen persyaratan, serta memantau status permohonan secara daring. Keberadaan aplikasi ini menunjukkan adanya upaya transformasi digital yang dilakukan Disdukcapil Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Meskipun akses pelayanan telah tersedia melalui berbagai kanal, tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat penduduk non permanen yang belum melakukan pelaporan karena keterbatasan waktu, kurangnya informasi, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pencatatan administrasi kependudukan. Selain itu, tidak semua pengelola hunian secara konsisten menyampaikan data penghuni kepada pemerintah daerah.

Pada indikator kepuasan pengguna, aparatur Disdukcapil menilai bahwa keberadaan database kependudukan sangat membantu dalam mempercepat proses penyusunan laporan dan pemantauan data

kependudukan. Sementara itu, masyarakat menyatakan puas ketika pelayanan berjalan lancar dan persyaratan mudah dipenuhi. Akan tetapi, kepuasan tersebut menurun ketika terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan pelayanan.

Gambar 4.5

Visualisasi Frekuensi Kata Isu Kependudukan Kota Balikpapan (NVivo 15)

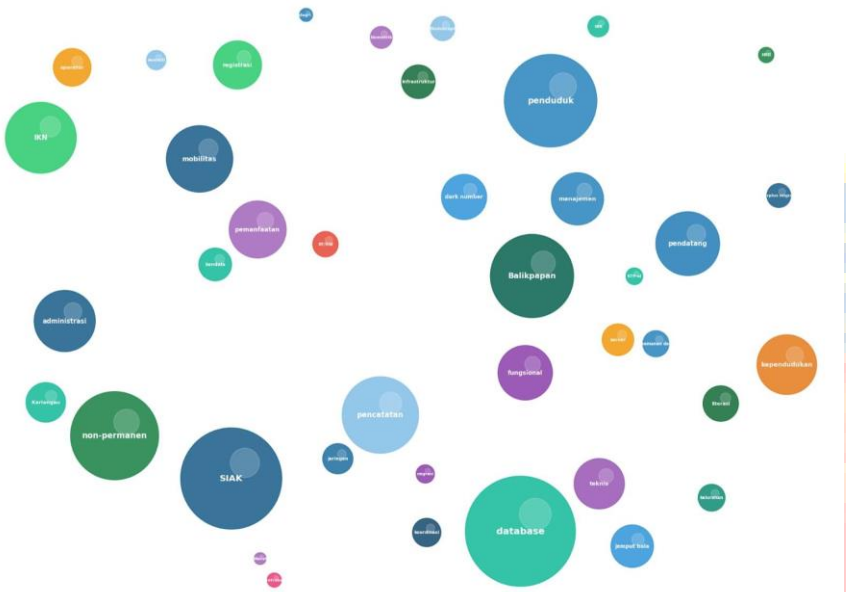

Sumber : diolah oleh penulis, 2026

Hasil analisis menggunakan NVivo 15 melalui Word Frequency Query memperlihatkan bahwa kata-kata seperti "pelaporan", "pendataan", "pelayanan", "Wacat", dan "online" muncul dengan frekuensi yang tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama para informan berada pada aspek pelayanan dan pencatatan penduduk non permanen melalui sistem digital. Di sisi lain, kemunculan kata "manual", "RT", dan "terlambat" menunjukkan bahwa sebagian proses pencatatan masih dipengaruhi oleh mekanisme konvensional sehingga efektivitas database belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi fungsional pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan telah berjalan cukup baik. Aparatur memiliki pemahaman yang memadai, motivasi kerja yang tinggi, akses pelayanan yang beragam, dan tingkat kepuasan pengguna yang relatif positif. Namun demikian, peningkatan sosialisasi, literasi digital, dan perluasan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan database kependudukan.

2. Dimensi Manajemen

Peneliti melakukan analisis terhadap dimensi manajemen untuk mengetahui bagaimana aspek perencanaan, pengorganisasian, sumber daya manusia, pengawasan dan evaluasi, serta koordinasi antarinstansi mendukung pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki kebijakan yang jelas terkait pencatatan penduduk non permanen. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai program pendataan yang mengacu pada Grand Design Pembangunan Kependudukan hingga tahun 2045. Penduduk non permanen tidak lagi dipandang sebagai kelompok administratif tambahan, melainkan sebagai bagian dari basis data yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam aspek pengorganisasian, pemanfaatan database kependudukan didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara Disdukcapil, kelurahan, RT/RW, dan pengelola hunian. Kepala Dinas bertanggung jawab sebagai pengambil kebijakan, bidang pengelolaan informasi mengelola sistem dan database, sedangkan bidang pemanfaatan data bertugas melakukan analisis dan penyusunan laporan. Struktur organisasi tersebut memungkinkan proses pencatatan berlangsung secara berjenjang dan terkoordinasi.

Pada aspek sumber daya manusia, penelitian menemukan bahwa jumlah operator SIAK yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus ditangani. Dengan hanya empat operator utama, beban kerja menjadi cukup tinggi terutama ketika terjadi peningkatan jumlah permohonan pelayanan atau kegiatan pendataan massal. Walaupun demikian, kompetensi aparatur secara umum sudah memadai karena sebagian besar telah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan database kependudukan.

Gambar 4.6

Tren Garis Waktu Mobilitas Penduduk Non Permanen Kota Balikpapan (NVivo 15)

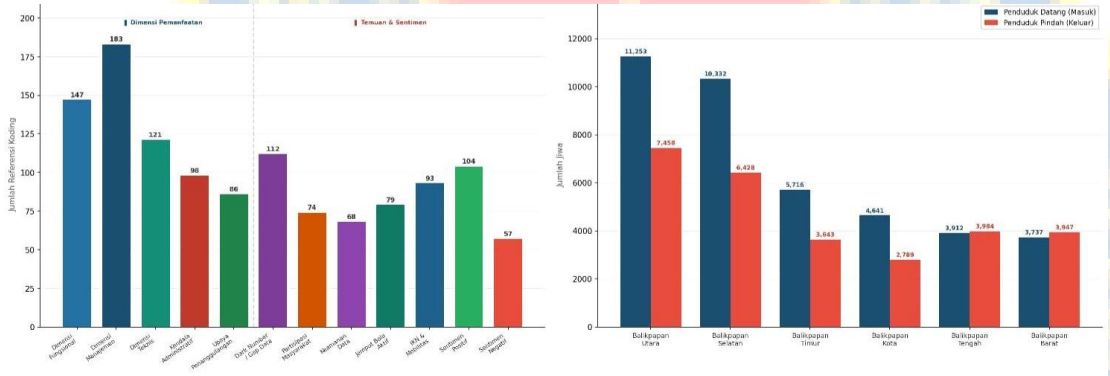

Sumber : diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan analisis Timeline Chart menggunakan NVivo 15, terlihat bahwa peningkatan aktivitas pendataan penduduk non permanen berkorelasi dengan pelaksanaan proyek strategis nasional dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan pengelolaan data dan pelayanan administrasi kependudukan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam aspek pengawasan dan evaluasi, Disdukcapil Kota Balikpapan telah menerapkan mekanisme monitoring terhadap capaian pendataan penduduk non permanen melalui rekapitulasi data dan forum evaluasi berkala. Selain itu, audit data dilakukan untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan validitas informasi yang tersimpan dalam database kependudukan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan dan penyusunan strategi pendataan berikutnya.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan database kependudukan. Disdukcapil secara aktif berkoordinasi dengan kelurahan, RT/RW, pengelola hunian, perusahaan, serta instansi terkait lainnya. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi beberapa pengelola hunian masih belum optimal.

Tabel 4.6

Tingkat Kehadiran Pengelola Hunian dalam Kegiatan Sosialisasi Pendataan Penduduk Non Permanen

Keterangan	Jumlah	Persentase
Hadir	26	65%
Tidak Hadir	14	35%
Jumlah	40	100%

Sumber : diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa 35 persen pengelola hunian tidak menghadiri kegiatan sosialisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas aktor masih perlu diperkuat agar pelaporan penduduk non permanen dapat dilakukan secara lebih konsisten.

Berdasarkan keseluruhan temuan, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi manajemen telah mendukung pemanfaatan database kependudukan secara cukup baik melalui adanya kebijakan yang jelas, struktur organisasi yang terdefinisi, dan mekanisme evaluasi yang berjalan. Namun demikian, penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan pemerataan pelatihan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan database kependudukan.

3. Dimensi Teknis

Dimensi teknis dianalisis untuk mengetahui kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, kualitas jaringan, dan keamanan data dalam mendukung pencatatan penduduk non permanen.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Balikpapan telah memiliki infrastruktur perangkat keras yang cukup memadai. Komputer kerja, server, perangkat komunikasi, sistem antrean elektronik, serta layar ganda pada beberapa meja operator telah tersedia untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.

Meskipun demikian, pada jam pelayanan tertentu jumlah perangkat yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingginya jumlah pemohon. Akibatnya, antrean pelayanan masih terjadi terutama ketika terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses layanan secara bersamaan.

Dari sisi perangkat lunak, pemanfaatan database kependudukan didukung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi Wacat. Kedua sistem tersebut telah terintegrasi sehingga memungkinkan proses pencatatan, pemutakhiran data, dan penyusunan laporan dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, operator baru masih membutuhkan waktu adaptasi karena beberapa fitur memerlukan pemahaman teknis yang cukup mendalam.

Kendala utama yang ditemukan pada dimensi teknis adalah kualitas jaringan dan kestabilan konektivitas. Berdasarkan hasil wawancara, gangguan jaringan masih sering terjadi terutama pada jam sibuk sehingga menghambat proses pelayanan dan pemutakhiran data secara real time. Ketika server mengalami gangguan, operator tidak dapat melanjutkan proses input data sehingga menyebabkan penumpukan antrean dan keterlambatan pelayanan.

Gambar 4.7

Tree Map Distribusi Sektoral Penduduk Non Permanen Kota Balikpapan (NVivo 15)

(Sisipkan Gambar 4.5 Tree Map NVivo 15)

Analisis Tree Map menggunakan NVivo 15 menunjukkan bahwa penduduk non permanen terkonsentrasi pada kawasan industri, proyek pembangunan, dan hunian sementara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur jaringan dan perangkat pelayanan perlu diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

Dalam aspek keamanan data, SIAK telah menerapkan mekanisme autentikasi berbasis user ID dan kata sandi, serta pembatasan hak akses sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pengguna. Data individu tidak dapat diakses secara bebas dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan maupun perencanaan dalam bentuk data agregat.

Selain itu, terdapat pengawasan internal terhadap penggunaan akun operator guna mencegah penyalahgunaan data pribadi. Walaupun demikian, peningkatan kesadaran aparatur mengenai perlindungan data pribadi tetap diperlukan mengingat volume data penduduk non permanen yang terus meningkat setiap tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi teknis pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan telah didukung

oleh perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem keamanan yang relatif memadai. Akan tetapi, kualitas jaringan, kapasitas perangkat, dan stabilitas sistem masih menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki agar proses pencatatan penduduk non permanen dapat berlangsung secara cepat, akurat, dan berkelanjutan.

3.2. Kendala Pemanfaatan Database Kependudukan bagi Penduduk Non Permanen di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, ditemukan beberapa kendala yang masih memengaruhi optimalisasi pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen. Kendala tersebut berasal dari aspek teknis, manajemen, maupun fungsional yang saling berkaitan satu sama lain. Dari aspek teknis, permasalahan yang paling dominan adalah gangguan jaringan internet dan keterbatasan kapasitas server yang menghambat proses input, verifikasi, dan pemutakhiran data secara real time. Ketika terjadi gangguan sistem, pelayanan menjadi lebih lambat sehingga antrean masyarakat meningkat dan pekerjaan operator menumpuk.

Dari aspek manajemen, kendala terlihat pada keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengelola database dibandingkan dengan tingginya mobilitas penduduk non permanen di Kota Balikpapan. Pelaksanaan pelatihan yang belum merata, perbedaan kemampuan aparatur di tingkat kelurahan dan RT, serta mekanisme pengawasan kualitas data yang belum optimal menyebabkan masih ditemukannya data yang belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala. Sementara itu, dari aspek fungsional, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat non permanen dan pengelola hunian menjadi tantangan utama. Sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan penduduk non permanen tidak memberikan manfaat langsung sehingga kurang memiliki kesadaran untuk melapor. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk non permanen yang berada di Kota Balikpapan dengan jumlah yang berhasil tercatat dalam database kependudukan.

3.3 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan

Dalam menghadapi berbagai kendala yang ditemukan selama proses pemanfaatan database kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pencatatan penduduk non permanen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan program pendataan penduduk non permanen secara masif melalui pelibatan aparatur kelurahan, RT/RW, dan petugas lapangan guna memastikan seluruh penduduk yang datang ke Kota Balikpapan dapat teridentifikasi dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Program ini juga didukung oleh target pendataan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kependudukan daerah.

Selain itu, Disdukcapil terus mengembangkan pemanfaatan aplikasi Wacat sebagai sarana pelaporan dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Pemanfaatan aplikasi tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap proses manual. Dari sisi kelembagaan, Disdukcapil secara berkala melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan forum koordinasi dengan kelurahan, RT/RW, serta pengelola hunian guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pihak yang terlibat. Upaya jemput bola dan layanan keliling juga dikembangkan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Melalui berbagai langkah tersebut, Disdukcapil berupaya meningkatkan kualitas database kependudukan agar lebih lengkap, akurat, dan mutakhir sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Balikpapan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan secara umum telah berjalan cukup baik berdasarkan dimensi fungsional, manajemen, dan teknis. Pada dimensi fungsional, aparatur Disdukcapil, kelurahan, dan RT telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi Wacat dalam mendukung proses pencatatan penduduk non permanen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggraini dan Manar (2025) yang menyatakan bahwa implementasi SIAK mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung akurasi data kependudukan. Keberadaan aplikasi Wacat sebagai media pelaporan daring juga menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Pada dimensi manajemen, penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki kebijakan, struktur organisasi, dan mekanisme koordinasi yang cukup jelas dalam mendukung pendataan penduduk non permanen. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Alam (2024) yang menyebutkan bahwa efektivitas sistem administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan dan tata kelola organisasi yang baik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan jumlah operator, pelaksanaan pelatihan yang belum merata, serta partisipasi sebagian pengelola hunian yang masih rendah menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan database kependudukan.

Dari dimensi teknis, hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki Disdukcapil Kota Balikpapan relatif memadai melalui dukungan server, perangkat komputer, SIAK, dan aplikasi Wacat yang terintegrasi. Akan tetapi, gangguan jaringan internet dan keterbatasan kapasitas sistem masih menjadi hambatan utama dalam proses pelayanan. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Aini dan Firmansyah (2022) yang menemukan bahwa kendala jaringan, keterbatasan perangkat, dan jumlah operator yang terbatas masih menjadi permasalahan dalam implementasi SIAK. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa keberhasilan pemanfaatan database kependudukan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur pendukungnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat non permanen masih menjadi tantangan dalam pencatatan kependudukan. Sebagian masyarakat masih menganggap pencatatan penduduk non permanen tidak memberikan manfaat langsung sehingga belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melapor. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Gusty (2025) serta Utami dan Dewi (2019) yang menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat dan minimnya sosialisasi menjadi faktor utama belum optimalnya pendataan penduduk non permanen. Namun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda karena dilakukan di Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memiliki tingkat mobilitas penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan daerah penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru mengenai pentingnya pemanfaatan database kependudukan digital dalam mengelola arus migrasi dan mobilitas penduduk pada wilayah penyangga IKN.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan database kependudukan telah memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung tertib administrasi kependudukan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Temuan ini memperluas kajian administrasi kependudukan dengan menggunakan Teori Pemanfaatan Napitupulu yang menekankan keterkaitan antara aspek fungsional, manajerial, dan teknis dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan suatu sistem informasi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan. Faktor tersebut meliputi komitmen aparatur Disdukcapil dalam memberikan pelayanan, tersedianya aplikasi Wacat sebagai inovasi pelayanan digital, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah yang memasukkan pendataan penduduk non permanen sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kependudukan jangka panjang. Kolaborasi antara Disdukcapil, kelurahan, RT/RW, dan pengelola hunian juga menjadi faktor penting dalam mendukung proses pengumpulan dan pemutakhiran data.

Selain faktor pendukung, penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat yang masih memengaruhi efektivitas pemanfaatan database kependudukan. Faktor tersebut antara lain gangguan jaringan internet, keterbatasan jumlah operator dibandingkan volume pekerjaan, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat non permanen, serta belum optimalnya keterlibatan pengelola hunian dalam kegiatan pelaporan penghuni. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat selisih antara jumlah penduduk non permanen yang berada di Kota Balikpapan dengan jumlah yang berhasil tercatat dalam database kependudukan.

Temuan menarik lainnya adalah meningkatnya kebutuhan data kependudukan non permanen seiring perkembangan Kota Balikpapan sebagai wilayah penyangga IKN. Tingginya mobilitas tenaga kerja, pekerja proyek, dan pendatang baru menyebabkan kebutuhan terhadap sistem pendataan yang cepat, akurat, dan terintegrasi menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan literasi administrasi kependudukan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan pada masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan database kependudukan dalam pencatatan penduduk non permanen di Kota Balikpapan telah berjalan cukup baik berdasarkan dimensi fungsional, manajemen, dan teknis. Pemanfaatan SIAK dan aplikasi Wacat mampu mendukung proses pencatatan, pemutakhiran, dan pengelolaan data penduduk non permanen secara lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa gangguan jaringan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dan pengelola hunian. Untuk mengatasi kendala tersebut, Disdukcapil Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya melalui pendataan masif, pengembangan layanan digital, peningkatan koordinasi, sosialisasi, serta layanan jemput bola. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas database kependudukan sehingga lebih lengkap, akurat, dan mutakhir dalam mendukung tertib administrasi kependudukan serta perencanaan pembangunan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Kota Balikpapan serta waktu penelitian yang relatif singkat. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman fenomena secara mendalam dan tidak ditujukan untuk generalisasi statistik.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pemanfaatan database kependudukan pada wilayah penyangga IKN lainnya dengan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem administrasi kependudukan dalam mengelola mobilitas penduduk yang semakin dinamis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan penelitian yang terdiri atas aparatur Disdukcapil, pihak kelurahan, RT/RW, pengelola hunian, dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian hingga penyusunan artikel ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aini, D. N., & Firmansyah, A. (2022). Efektifitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, *21*(2), 169. https://doi.org/10.37849/midi.v21i2.265

Alam, G. P. Al. (2024). *EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN PENERBITAN KTP-el DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU U UTARA*.

Andreassen, R., Hansen, B. K., Pokrovskaya, L., Zhakov, V., Kling, D., Klütsch, C. F. C., Fløystad, I., Eiken, H. G., & Hagen, S. B. (2024). A DNA profiling system for conservation management of Kamchatka brown bear (Ursus arctos piscator); population data and system performance from 16 autosomal STRs. *Forensic Science International: Animals and Environments*, *6*. https://doi.org/10.1016/j.fsiae.2024.100092

Anggraini, M. D., & Manar, D. G. (2025). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui SistemInformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies; Vol 14, No 2 (2025): Vol 14, No 2 : Periode Wisuda April 2025*.

Chai, N., & Mao, C. (2022). Population management in an urban center using the dynamic integrated solution for an adequate atmospheric environmental quality. *Environmental Research*, *205*. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112482

Escobar-González, M., López-Martín, J. M., Mentaberre, G., Valldeperes, M., Estruch, J., Tampach, S., Castillo-Contreras, R., Conejero, C., Roldán, J., Lavín, S., Serrano, E., & López-Olvera, J. R. (2024). Evaluating hunting and capture methods for urban wild boar population management. *Science of the Total Environment*, *940*. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173463

Inibalikpapan. (2025). Disdukcapil data penduduk non-permanen, dimulai Mei ini. *Inibalikpapan*.

Khoong, E. C., Olazo, K., Rivadeneira, N. A., Thatipelli, S., Barr-Walker, J., Fontil, V., Lyles, C. R., & Sarkar, U. (2021). Mobile health strategies for blood pressure self-management in urban populations with digital barriers: systematic review and meta-analyses. In *npj Digital Medicine* (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.1038/s41746-021-00486-5

Marthalina, M. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403

Marthalina, M. (2022). AGILITY ORGANISASI PASCA ALIH JABATAN FUNGSIONAL. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, *10*(1). https://doi.org/10.33701/jmsda.v10i1.2502

Mphahlele, N. S., Kekwaletswe, R. M., & Seaba, T. R. (2025). Model to explain use of E-Government service change: Use of unified theory of acceptance and use of technology and information systems success model to explain use of E-Government service change: Emerging market case. *Telematics and Informatics Reports*, *17*. https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100190

Ni Luh Putu Sri Utami, Nyoman Diah Utari Dewi, I. A. P. S. W. (2019). EFEKTIVITAS

PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK NON PERMANEN DI KELURAHAN TONJA, DENPASAR. *Concept and Communication*, *null*(23), 301–316. https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009

Prabowo, H. (2019). Influence of Implementation of Development and Supervision Policy to the Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.63-73

Putri, R., & Gusty, P. (2025). Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Warga Non-Permanen dalam Memitigasi Urbanisasi di Kota Surabaya. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *2*(3), 59–71. https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/1001

Simangunsong, F. (2017). *Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif (cet. 3). IPDN Press / Alfabeta?Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif* (cet. 3). IPDN Press / Alfabeta?

Soerya Putri, A. R. (2016). PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANDUNG). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *42*(2). https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.144

Sri Hartati, Y. (2019). ANALISIS DISPARITAS WILAYAH ANTAR PROVINSI DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *10*(1). https://doi.org/10.55049/jeb.v10i1.104

Surya, B., Salim, A., Saleh, H., Suriani, S., Yunus, K., & Taibe, P. (2022). Population mobility and urban transport management: perspectives environmental quality degradation and sustainable development of suburban Makassar City, Indonesia. *Hungarian Geographical Bulletin*, *71*(4). https://doi.org/10.15201/hungeobull.71.4.5

Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*, *6*(4).

Syaefullah, S., Darmawan, A., & Rudi, V. (2022). Local Government Innovation in Implementing Mandatory Authorities in The Health Office Central Lombok District. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *2*(7). https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i7.532

Yuniasari, H., Prihatini, J., & Syaefulloh. (2021). PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BAMBU SABUK SEMERU DI DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, *6*, *Nomor 1*.